

**KONSEP *MUDHARABA*: PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP *NET
REVENUE SHARING***
(Study pada BNI SYARIAH)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Alauddin
MAKASSAR
Oleh :
SULFA
90400114155

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Sulfa

Nim : 90400114155

Tempat/Tgl. Lahir : Palandro, 02 Oktober 1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl Tidung Raya

Judul : Konsep *Mudharabah*: Perspektif Keadilan Terhadap *Net Revenue Sharing* (Studi Pada BNI Syariah Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Penyusun,

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Sulfa

NIM: 90400114155



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara Sulfa, NIM : 90400114155, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, "**Konsep Mudharabah: Perspektif Keadilan Terhadap Net Revenue Sharing (Studi pada BNI Syariah)**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada ujian **MUNAQASYAH**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa,

Maret 2019

Dosen Penguji dan Pembimbing

Penguji 1 : Dr. Saiful Muchlis, SE., M.Si., Ak

Penguji 2 : Andi Wawo, SE., M.Sc., Ak

Pembimbing 1 : Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak

Pembimbing 2 : Sumarlin, SE., M.Ak

(.....) (.....) (.....) (.....)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Konsep Mudharabah: Perspektif Keadilan Terhadap Net Revenue Sharing (Studi Pada Bank BNI Syariah Makassar)*”, yang disusun oleh SULFA, NIM: 90400114155, Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2019, bertepatan dengan 15 Rajab 1440 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, 22 Maret 2019

15 Rajab 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Prof. Dr.H.Muslimin Kara, M.Ag.
Munaqisy I : Dr.Saiful Muchlis, SE.,M.SA.AK.CA
Munaqisy II : Andi Wawo, SE.,M.Sc.,Ak
Pembimbing I : Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si.,Ak
Pembimbing II : Sumarlin, SE., M.Ak.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan hidayahnya serta ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam “Allahumma Sholli Ala Muhammad Waala Ali Muhammad” juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya.

Skripsi dengan judul **“Konsep Mudharabah: perspektif Keadilan Terhadap Net Revenue Sharing (Study Pada BNI Syariah Makassar)”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini membutuhkan perjuangan dan usaha dalam penyelesaiannya, mulai dari tahap penyusunan sampai terkumpulnya semua data, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang membantu memudahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis menghaturkan banyak rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Halka dan Ibunda Hj. Sitti Hajar yang telah melahirkan dan membesarkan, mendidik, menyayangi dan memotivasi anak-anaknya, yang telah mempertaruhkan

segalanya serta tak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT demi kebahagiaan dan kesuksesan penulis, dan juga kepada saudara-saudaraku tercinta yang telah serta memberikan semangat, motivasi, dan doa yang terbaik untuk kesuksesan penulis. Serta kepada segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk mencapai kesuksesan dimasa depan.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin M, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar
4. Bapak Memen Suwandi SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Saiful, SE., M.SA., Ak. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat.
6. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing I dan Bapak Sumarlin, SE., M.Ak. Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.

7. Bapak Dr. Saiful Muchlis, SE.,M.SA.,Ak.CA. selaku penguji I dan Bapak Andi Wawo.,SE.,M.SC., Ak. Selaku penguji II yang dengan iklas telah memberikan saran dan masukan ditengah kesibukannya demi kesempurnaan tulisan ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
9. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN alauddin Makassar.
10. Kantor PT Bank BNI Syariah Makassar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2014 Contabilita, terkhusus untuk Akuntansi D, terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar, kakak-kakak maupun adik-adik tercinta, terimakasih atas persaudaraannya.
13. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Amin Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan

sehingga dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis,

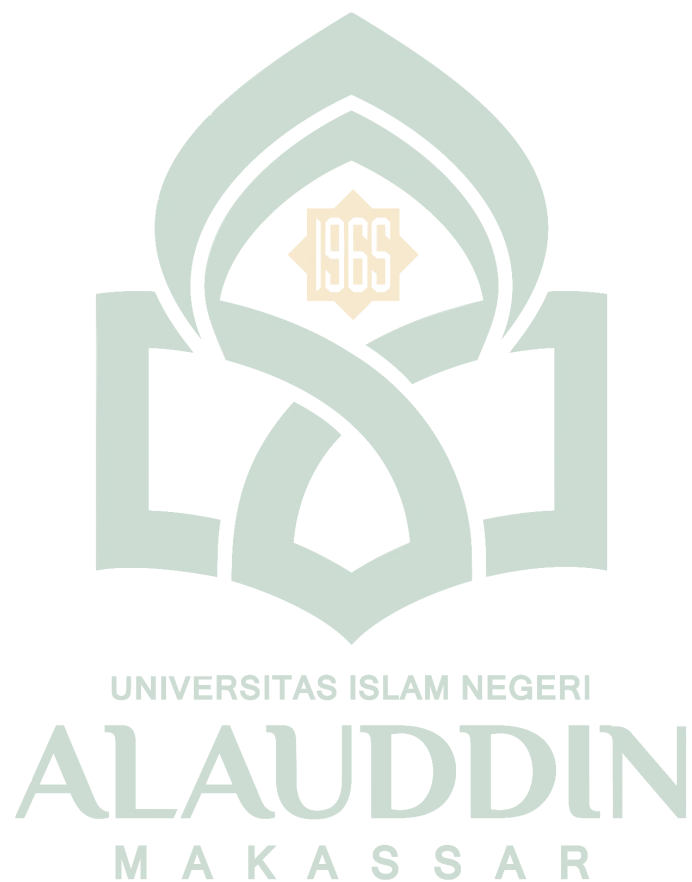
SULFA
90400114155



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Penelitian Terdahulu	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori Keadilan (<i>Justice</i>).....	13
B. Teori Ketidakpastian (<i>Uncertainty</i>)	15
C. Akuntansi <i>Mudharabah</i>	16
D. Prinsip Akuntansi <i>Mudharabah</i> Syariah	17
E. Konsep Bagi Hasil	19
F. Rerangka pikir.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Analisis Data	39
G. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah	44
B. Alur <i>Mudharabah</i> Pada PT BNI Syariah Makassar.....	54

C. Prinsip Pelaksanaan Keadilan dalam <i>Net Revenue Sharing</i> Pada PT Bank BNI Syariah Makassar	60
D. Perlakuan Akuntansi <i>Mudharabah</i> Pada PT Bank BNI Syariah Makassar	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86



DAFTAR GAMBAR

NO

Teks

Halaman

2.1 Rerangka Pikir



ABSTRAK

NAMA : SULFA

NIM : 90400114155

JUDUL : KONSEP *MUDHARABAH*: PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP *NET REVENUE SHARING* (Studi: BNI Syariah Makassar)

Prinsip syariah pada Penerapan Akuntansi Syariah tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran islam Al-Qur'an dan Hadist adalah Riba. Untuk menghindari transaksi Riba maka dalam perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil, salah satunya melalui pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi, fenomena yang terjadi saat ini dilihat dari laporan keuangan statistic perbankan syariah, sehingga bagi hasil pada perbankan syariah lebih komprehensif, yaitu pemenuhan unsur kebaikan dan manfaat yaitu berdimensi duniawi dan ukhrawi, artinya tidak semata berorientasi keuntungan, tetapi memaksimalkan kesejahteraan social dan protektif untuk pemenuhan kebutuhan *shahibul maal* dan *mudharib*.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian pada PT Bank BNI Syariah Makassar. Peneliti mengambil data dengan teknik wawancara dan beberapa data sekunder pendukung lainnya dari situs resmi entitas. Kemudian peneliti menganalisis dan menginterpretasikan data yang didapatkan. Dan pembagian hasil Bank BNI Syariah menggunakan metode *Net Revenue Sharing*.

Hasil penelitian menunjukka bahwa PT Bank BNI Syariah Makassar telah melaksanakan prinsip-prinsip sesuai dengan aturan Fatwa DS MUI No.07/DSSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000, akan tetapi BNI Syariah terlalu berhati-hati melaksanakan pembiayaan *mudharabah*. Kemudian sistem bagi hasil antara pihak bank dan nasabah harus saling mempercayai, nasabah harus transparansi dalam melaporkan keuntungan yang didapatkan. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan laba secara otomatis.

Kata kunci: *Konsep Mudharabah, Perspektif Keadilan, Net Revenue Sharing*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harahap (2001, 2003) melakukan kajian PSAK No.59, yang analisisnya menyebutkan bahwa PSAK No.59 masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional. Atau dengan kata lain, filosofi yang digunakan sebagai pijakan dalam perumusan PSAK No.59 masih didominasi oleh konsep konvensional. Kajian terhadap PSAK No.59 juga dilakukan Ratmono (2004) dengan melihat konsep pengungkapan (*disclosure*) pelaporan keuangan pada *Islamic values*. Hasil analisis yang dilakukan menjelaskan bahwa: 1) konsep pengungkapan PSAK No.59 mengenai *Islamic values* masih terbatas pada *direct stakeholders* dan terakomodasinya item-item yang ditujukan oleh seluruh *stakeholders* dan peristiwa sosial-lingkungan. Pengungkapan transaksi yang dilakukan juga masih terjebak Pada persoalan-persoalan materi (ekonomi) dan belum memperhatikan perkembangan sosial dan lingkungan. 2) bahwa PSAK No.59 didekonstruksi agar sifat syariahnya tidak terbatas pada persoalan-persoalan materi (informasi) namun Juga bisa disandingkan dengan sprit akuntabilitas.

Ada berbagai macam jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional, sementara dua risiko terakhir dihadapi khusus oleh bank syariah. Dengan demikian, manajemen risiko antara konvensional dan syariah

tidak jauh berbeda. Yulianti (2009) mengatakan bahwa teknik-teknik standar yang digunakan bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah, bisa diterapkan pada bank Syari'ah. Beck *et al.*, (2012) menjelaskan bahwa bahkan secara praktik tidak ada perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Sementara penelitian yang dilakukan Kamla (2009), menyimpulkan bahwa manifestasi akuntansi Islam (syariah) gagal menyajikan sistem akuntansi yang lebih emansipatoris, sehingga tidak banyak berbeda dengan akuntansi konvensional. Sedangkan Hafizah (2004) mengkiaskan akuntansi sebagai cermin yang digunakan untuk merefleksikan realitas sosial dan cermin itu sendiri merupakan produk dari nilai-nilai ideologis dimana cermin itu dibuat. Dengan demikian, akuntansi bukan sebagai ilmu yang bebas nilai, namun akuntansi adalah ilmu yang sarat dengan nilai.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dar dan Persley (2001), menyimpulkan bahwa penghindaran intensif dari melakukan kecurangan akan mendorong penerapan model PLS pada perbankan syariah dan praktek menyembunyikan informasi berpengaruh negatif terhadap penerapan PLS. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yahya dan Edy (2011) juga mengatakan bahwa penerapan konsep bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan konsep bunga. Sedangkan perbankan syariah saat ini masih memegang kukuh konsep tidak boleh rugi selama menyalurkan dana kepada mudharib. Mindset manajemen perbankan syariah yang cenderung menghindari rugi sangat cocok dikaitkan dengan penerapan metode bagi hasil *revenue sharing* yang dianut oleh perbankan syariah Indonesia khususnya. Mereka lebih memilih metode tersebut

daripada *profit and loss sharing* (PLS) karena dinilai lebih menguntungkan (Rahmanti dkk., 2013). Beberapa peneliti muslim (Hidayat 2010; Gustina 2011), mengatakan bahwa konsep *profit sharing* jauh lebih bersifat kemanusiaan dibandingkan dengan konsep NRS. Bagaimana tidak, *revenue sharing* menggunakan laba kotor sebagai dasar bagi hasil sementara PLS menggunakan laba bersih (Wiroso 2013). Bahkan lebih miris lagi secara gamblang Karim (2001) menyebutkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil selain metode bagi keuntungan dan pendapatan, bank syariah diijinkan menggunakan metode bagi penjualan. Mencermati dari dasar bagi hasil, jelas terlihat NRS memberikan angin surga bagi pemilik dana, sementara memaksa *mudharib* untuk menanggung beban operasional usaha. Dengan demikian, fakta yang terjadi atas penerapan NRS adalah satu pihak (pemilik dana) mendzholimi pihak lain (pengelola dana) dengan upaya menghindari kerugian usaha.

Karim (2004) menjelaskan bahwa kontrak bagi hasil tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Jadi dalam kontrak ini return dan timing *cash flow* nya tergantung pada kinerja bisnis *mudharib* (pengelola *danamudharabah*). Antonio (2001) menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian. Secara teoritis, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kontrak *mudharabah* menggunakan sistem *profit and*

losssharing (PLS), dimana ketika bisnis yang dikelola *mudharib* menghasilkan keuntungan, untung usaha dibagi dengan kedua pihak secara proporsional, sedangkan jika terjadi kerugian, maka pihak pemilik dana (*shohibul maal*) yang mengganggu kerugian financial. PLS dinilai lebih adil dibandingkan dengan sistem penetapan bunga seperti bank konvensional, sedangkan SDN-MUI mengizinkan LKS untuk menerapkan dua metode bagi hasil, yaitu *Net Revenue Sharing* (NRS) dan *Profit Sharing* (disebut juga PLS). Berbeda dengan negara lain seperti Malaysia dan Arab, metode bagi hasil yang diijinkan hanya PLS.

Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, perlakuan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok yang mesti dijadikan fokus perhatian adalah manakah metode yang adil dan menggambarkan apa yang telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku yang dialami (Harahap, 2002). Sejalan dengan makna keadilan, Shihab dalam Alimuddin (2011) menyatakan bahwa “nilai keadilan terkandung makna menempatkan atau mendistribusikan/mendapatkan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Makna “keadilan” ini berlawanan dengan makna “kezaliman” yang berarti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. (Shihab, 1996).

Bagi hasil adalah salah satu praktik dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam (Khasanah, 2010). Sehingga, bagi sektor-sektor usaha atau lembaga bisnis yang menerapkan bagi hasil dalam usahanya agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Menurut Rohmatin (2008) bahwa bagi hasil

merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain. Islahi (1997) menekankan keharusan adanya keadilan dalam kerja sama dan penetapan pembagian (yang adil pula) dari kedua pihak itu atas keuntungan, baik dalam keadaan untung maupun rugi. Dalam kerjasama ini ada dua faktor yang dipertimbangkan yaitu modal dan tenaga kerja, yang memiliki posisi seimbang dalam proses produksi. Kemudian dijelaskan, bahwa keuntungan adalah sesuatu pendapatan tambahan (nama) dari penggunaan tenaga seseorang (badan) dan pihak yang lain atas modal (mal). Jadi, harus dibagi di antara mereka setiap penghasilan tambahan yang diperoleh hasil dari dua faktor itu.

Unsur-unsur keadilan dalam sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah mencakup nilai keadilan dalam Islam, dalam buku Baidhawry (2007) Keadilan dibagi menjadi dua lingkup, yakni: pertama, keadilan kuantitatif yang berhubungan dengan segala hal yang dapat diukur secara inderawi seperti timbangan, takaran, ukuran, dan distribusi barang dan jasa; dan kedua, keadilan kualitatif sebagai pola yang dipergunakan untuk mendesain pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hukum, undang-undang, dan kepemilikan. Terhadap persepsi yang menganggap sistem bagi hasil pada bank syariah yang ternyata nisbah bagi hasilnya lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional adalah suatu persepsi yang keliru, karena pada bank syariah memiliki perhitungan yang bersifat pasti. Apabila besarnya laba dihitung besar, maka bagi hasilnya pun juga besar dan hal ini tidak mempengaruhi pendapatan peminjam modal, karena untung yang didapatkannya juga besar. Ini berarti

keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi / bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam pembagian nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Karim, 2001).

Di dalam undang – undang No. 21 tahun 2008 tercantum bahwa fungsi perbankan syariah melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi pelaksanaan konsep bagi hasil dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di perbankan syariah. Untuk keperluan pengawasan tentang hal tersebut Dewan Syariah Nasional membentuk garis panduan produk bank syariah yang di ambil dari sumber – sumber hukum islam (Antonio, 2001). Di dalam pelaksanaan konsep bagi hasil dalam hal kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat, akan tetapi dalam penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembiayaan di bank syariah tidak berbeda dengan kredit di bank konvensional atau belum benar – benar diterapkan sesuai hukum islam.

Cara penyaluran dana pada Bank BNI Syariah pada dasarnya mengikuti petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direksi atau Kantor Pusat Jakarta. Dalam pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam pelaksanaannya. Setelah penentuan nisbah, pada saat akad juga ditentukan metode/konsep apa yang akan digunakan dalam pembagian

hasil usaha tersebut. Dalam pelaksanaannya di Bank BNI Syariah, perhitungan pembagian hasil usaha dalam pembiayaan mudharabah menggunakan metode/konsep *Net Revenue Sharing* (Perbawa, 2012).

B. Rumusan Masalah

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam pembiayaan mudharabah terdapat dua konsep pembagian hasil yaitu *Net Revenue Sharing* (NRS) dan *Profit Sharing* atau *Profit and Loss Sharing* (PLS). Dalam beberapa riset mengemukakan bahwa konsep PLS lebih adil dibandingkan dengan konsep NRS karena jumlah yang dibagihasilkan kepada kedua pihak telah dikurangi dengan pengeluaran usaha dalam bentuk HPP dan beban operasional. Tapi dilihat dari analisis perlakuan akuntansi diketahui bahwa jika terjadi keuntungan, bank memperoleh bagian dari nisbah sesuai dengan akad. Sementara jika bisnis yang dikelola mudharib melaporkan kerugian, maka pihak mudharib (nasabah) yang menanggung kerugian financial sepenuhnya. Dengan kata lain, jika untung ikut memperoleh untung sementara rugi bank tidak mendapatkan apa-apa. Kembali pada manajemen risiko syariah yang mensyaratkan bahwa keuntungan harus diikuti dengan risiko (*al ghummu bil*

ghurmi), maka menjadi tidak sejalan antara konsep manajemen risiko syariah dengan konsep PLS dan praktiknya. Penerapan prinsip bagi hasil berdasarkan laba kotor atau laba bersih mengikuti dasar *accounting income*. Dalam struktur penghitungan menggunakan dasar tersebut, *income* diperoleh dari hasil pengurangan antara pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*). Beban menjadi pos yang bersifat mengurangi besarnya laba, sehingga tidak heran ketika pihak manajemen cenderung berupaya mengurangi jumlah beban untuk memaksimalkan *income*. Sistem bagi hasil baik PLS maupun NRS masih menggunakan perhitungan pendapatan dikurangi beban.

Accounting income (akar dari laporan Laba Rugi), jika digunakan dalam akuntansi syariah sebagaimana yang terjadi pada telah akuntansi mudharabah, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini tidak nampak aspek keadilan sosial, tetapi hanya muncul sifat egoistik akuntansi, karena berujung pada maksimasi *income* untuk pemilik. Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alur *Mudharabah* pada BNI Syariah Makassar?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan dalam *Profit And Loss Sharing* pada pembiayaan *Mudharabah* BNI Syariah Makassar?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi *Mudharabah* dalam konsep bagi hasil (*Net revenue sharing*) pada BNI Syariah Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui alur *Mudharabah* pada BNI Syariah Makassar.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip keadilan dalam *Profit And Loss Sharing* pada pembiayaan *Mudharabah* BNI Syariah Makassar.
3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi *Mudharabah* dalam konsep bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) pada BNI Syariah Makassar.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmanti dkk (2013) menyatakan bahwa NRS ternyata tidak lebih adil dibandingkan dengan sistem bagi hasil profit sharing (PLS) seperti yang diungkapkan dalam MUI no.15 tentang distribusi bagi hasil. Hardiwinoto (2011) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa metode revenue sharing lebih sesuai dan lebih menguntungkan daripada profit sharing, sehingga BPRS PNM BINAMA menggunakan metode revenue sharing. Metode revenue sharing yang dipakai oleh BPRS PNM BINAMA sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan.

Yahya dan Edy (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Teori bagi hasil (*profit and loss sharing*) bila dianalisis menggunakan teori keuangan/moneter lebih mencerminkan kesesuaian dengan teori flow concept. Sedangkan munculnya bunga bank lebih didasari pemikiran teori stock concept. Penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan profit (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian profit (untung) pada penggunaan

uang. Bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan konvensional.

Nabhan (2010) Prinsip *profit and loss sharing* adalah mekanisme keuangan yang paling baik ditinjau dari aspek hukum Islam sekaligus menjadi ciri keberadaan bank Islam. Prinsip *profit and loss sharing* dalam Bank Islam akan dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasi dana mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Prinsip ini (*profit and loss sharing*) pada gilirannya dapat meningkatkan kekuatan portofolio investasi. Semakin tinggi menjalankan prinsip *profit and loss sharing*, semakin tinggi kemampuan bank untuk memperoleh dana nasabah, yang berarti pula meningkatkan kekuatan portofolio investasi.

Junaidi, SH (2006) Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (Study di Bank Syariah Mandiri Kudus). Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Bagi hasil merupakan jiwa dari perbankan syariah karena dengan bagi hasil di ditemukan kepuasan para pihak. Kepuasan di sini adalah mereka para pihak yaitu shohibul mal maupun mudharib-nya menerima pengembalian dan mengembalikan dana dengan hasil yang diperoleh dari mudharib menjalankan usahanya. Jadi besarnya prosentase hasil yang harus dibayarkan oleh mudharib kepada shohibul mal berdasarkan besar kecilnya penghasilan yang dibiayai oleh shohibul mal. Dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil ini Bank Syariah Mandiri (BSM) Kudus berpedoman

pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat. Yang besarnya tertentu dan disepakati oleh para pihak. Sistem *Revenue Sharing* dijadikan dasar pembagian nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri, sistem *revenue sharing* merupakan format bagi hasil yang berdasarkan atas pendapatan usaha.

Susiana (2010) Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah *revenue sharing* (bagi pendapatan) bukan *profit sharing* (bagi hasil) atau *loss sharing* (bagi untung dan rugi), berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, disesuaikan dengan arus kas (cash flow) dan tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar.

Pembiayaan Mudharabah dalam perspektif keadilan terhadap *Net Revenue Sharing* pada PT Bank BNI Syariah. Dalam konsep mudharabah terbagi atas dua metode yang pertama *Net Revenue Sharing* dan *profit And Loss Sharing*. Metode yang digunakan pada PT Bank BNI Syariah masih menggunakan *Net Revenue Sharing*. Metode bagi hasil yang digunakan *Net Revenue Sharing* (bagi pendapatan) bukan *Profit And Loss Sharing* (bagi untung atau rugi) berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah di awal akad.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menerapkan teori keadilan dan teori ketidakpastian dalam pengaplikasian konsep bagi hasil pada akuntansi mudharabah. Teori keadilan (*justice*) pertama kali dipopulerkan oleh J Stacy Adam tahun 1963, teori ini menganggap bahwa individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain dan kemudian berespon untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. (Ikhsan A dan Iskhak M, 2005). Teori tentang keadilan mengindikasikan bahwa ada dua bentuk keadilan: (i) keadilan distributif, yang memfokuskan pada respon yang berorientasi pada keadilan terhadap hasil akhir dan (ii) keadilan prosedural, yang memfokuskan pada respon yang berorientasi pada keadilan aturan dan prosedur dalam perusahaan. Literatur yang ada mengindikasikan bahwa kecemasan akan prosedur dalam perusahaan mengacu pada penilaian keadilan yang independen terhadap keadilan distributif (Thibaut & Walker, 1975; Lind dan Tyler, 1988). Sedangkan teori ketidakpastian pertama kali ditemukan oleh seorang ahli fisika yang bernama Werner Heisenberg pada abad ke 20. Ketidakpastian (*Uncertainty*) adalah sebuah kondisi dimana terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarnya. Dengan diterapkannya teori keadilan dan teori ketidakpastian dalam konsep bagi hasil maka diharapkan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah lebih nampak aspek keadilan sosial baik pada pihak mudharib maupun shihabul maal, bukan hanya muncul sifat egoistik akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan dan pengguna jasa pembiayaan mudharabah yang menjadi unit analisis penelitian ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan konsep bagi hasil baik itu *Net Revenue Sharing* maupun *Profit and Loss Sharing* yang lebih adil.
- b. Bagi penulis dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung atau acuan dalam penelitian kedepannya mengenai konsep bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan (*Justice*)

Teori keadilan pertama kali dipopulerkan oleh J Stacy Adam tahun 1963. Teori ini menganggap bahwa individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain dan kemudian berespon untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. (Ikhsan A dan Iskhak M, 2005). Teori tentang keadilan mengindikasikan bahwa ada dua bentuk keadilan: (i) keadilan distributif, yang memfokuskan pada respon yang berorientasi pada keadilan terhadap hasil akhir dan (ii) keadilan prosedural, yang memfokuskan pada respon yang berorientasi pada keadilan aturan dan prosedur dalam perusahaan. Literatur yang ada mengindikasikan bahwa kecemasan akan prosedur dalam perusahaan mengacu pada penilaian keadilan yang independen terhadap keadilan distributif (Thibaut & Walker, 1975; Lind dan Tyler, 1988).

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang – wenang. Jadi definisi keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Murtadha Muthahhari (1995), mengemukakan konsep adil dalam empat hal:

1. Adil, bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil, dalam persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya.
3. Adil, adalah memelihara hak-hak individu dan memelihara hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti itu adalah keadilan social yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya.
4. Adil, adalah memelihara hak atas berlanutnya eksistensi.

Dalam pandangan Islam, “nilai keadilan memiliki makna perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya (Shihab, 1996). Sejalan dengan makna keadilan tersebut, Shihab dalam Alimuddin (2011) menyatakan bahwa “nilai keadilan terkandung makna menempatkan atau mendistribusikan/mendapatkan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Makna “keadilan ini berlawanan dengan makna “kezaliman‘ yang berarti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. (Shihab, 1996).

Menurut Keraf (1998) Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan terdiri atas:

1. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Hal ini, memegang peranan dalam tukar menukar, baik pertukaran barang maupun pertukaran jasa, sebanyak mungkin harus dapat persamaan antara apa yang ditukarkan. Keadilan ini menuntut agar dalam interaksi social antara warga yang satu dengan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kewajibannya. Hal ini berarti prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, saling menghargai hak dan kepentingan orang lain. Dengan kata lain, dasarnya adalah keseimbangan atau kesetaraan antara semua pihak dalam transaksi social apapun.

Diterapkan dalam bisnis, berarti relasi usaha atau bisnis harus terjalin dalam hubungan yang setara dan seimbang antara pihak pemilik modal (sahibul maal) yang satu dengan yang lain sebagai pengelola dana (mudharib) dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Apabila terjadi tidak seimbangan, ketidakadilan, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) harus turun tangan dan memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan kerugian yang diderita korban. Dalam bisnis, keadilan, relasi, dan transaksi yang dianggap adil yang pada akhirnya melahirkan win win situation.

2. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, tiap-tiap orang tidak menuntut mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Dengan kata

lain keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil.

Keadilan distributif memiliki relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam pembiayaan syariah dengan system bagi hasil (mudharabah). Berdasarkan prinsip keadilan distributif aristoteles, setiap pihak baik sebagai pemilik modal (sahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib) harus mendapat bagian yang sesuai prestasi, fungsi dan tanggung jawab atau kontribusi yang diberikan kepadanya. Sebagian berat kontribusi, prestasi dan tanggung jawab pihak-pihak, semakin besar pula nisbah bagi hasil yang diperolehnya. Maka pada akhirnya memang imbalan ekonomi yang didapat setiap orang tidak sama, dan itu pun dibenarkan dan diterima sebagai hal yang adil dan etis.

Bagi hasil adalah salah satu praktik dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam (Khasanah, 2010). Sehingga, bagi sektor-sektor usaha atau lembaga bisnis yang menerapkan bagi hasil dalam usahanya agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Menurut Rohmatin (2008) bahwa bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain.

Islahi (1997: 196) menekankan keharusan adanya keadilan dalam kerja sama dan penetapan pembagian (yang adil pula) dari kedua pihak itu atas keuntungan, baik dalam keadaan untung maupun rugi. Dalam kerjasama ini ada

dua faktor yang dipertimbangkan yaitu modal dan tenaga kerja, yang memiliki posisi seimbang dalam proses produksi. Kemudian dijelaskan, bahwa keuntungan adalah sesuatu pendapatan tambahan (nama) dari penggunaan tenaga seseorang (badan) dan pihak yang lain atas modal (maal). Jadi, harus dibagi di antara mereka setiap penghasilan tambahan yang diperoleh hasil dari dua faktor itu.

B. Teori Ketidakpastian (*Uncertainty*)

Teori ketidakpastian pertama kali ditemukan oleh seorang ahli fisika yang bernama Werner Heisenberg pada abad ke 20. *Uncertainty* adalah sebuah kondisi dimana terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarnya. Ada perbedaan antara *uncertainty* dengan risiko, karena risiko mengacu pada situasi dimana kita dapat merinci semua hasil yang akan muncul beserta masing-masing probabilitasnya, sementara dalam *uncertainty* probabilitas dari hasil tersebut tidak diketahui besarnya.

Bisnis atau investasi pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari suatu ketidakpastian (*uncertainty contracts*). Dalam kerja sama bisnis atau investasi, para pelaku pasti akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkinan yang ada, yaitu: untung, rugi dan tidak untung dan tidak rugi. Jika keuntungan atau kerugian dari aktivitas bisnis atau investasi ini sejak awal ditetapkan hanya ditanggung oleh salah satu pihak, aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas ribawi, karena memperlakukan suatu kontrak yang berkarakter tidak pasti (*uncertainty contracts*) menjadi pasti (*certainty contracts*),

dan dilarang oleh Islam. Namun jika kedua belah pihak bersepakat sejak awal untuk melakukan bagi hasil terhadap risiko dan keuntungan, maka aktivitas bisnis ini sah dan diperbolehkan oleh Islam.

Faktor ketidakpastian adalah faktor yang given, sudah menjadi sunnatullah. Konsep tolong menolong, taawun, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam (Antonio, 2001). Penetapan suatu hasil usaha didepan dalam suatu kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan. Hal ini karena prinsip ketidakpastian usaha sehingga hasil yang didapat bisa sangat bervariasi, dari mulai untung sampai rugi.

Penerapan konsep bagi hasil sesungguhnya mempunyai manfaat yang sangat besar, namun penerapan konsep bagi hasil mempunyai beberapa kelemahan . Agar optimal, penerapan konsep bagi hasil harus dilakukan dengan pengetahuan yang memadai agar mekasanisme bagi hasil yang memiliki tujuan yang baik ini tidak disalahgunakan pihak yang semata-mata ingin mengambil keuntungan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem pembiayaan mudharabah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan

pembiayaan mudharabah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam pembiayaan mudharabah terdiri dari dua konsep, yaitu:

a. *Profit and Loss Sharing*

Profit and loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Karim, 2001).

b. *Net Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di

dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

C. Akuntansi Mudharabah: PSAK No. 105

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, terdapat tiga jenis mudharabah, yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, terdapat beberapa karakteristik mudharabah, yaitu sebagai berikut:

- a. Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer;
- b. Dalam mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, yaitu tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, dan mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga;

- c. Pada prinsipnya, dalam menyalurkan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad;
- d. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri; dan
- e. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

1. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

2. Pengakuan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, bagi pemilik dana, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Sedangkan bagi pengelola dana, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Kesalahan atau kelalaian pengelola dana dapat ditunjukkan oleh persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui oleh pemilik dana sebagai piutang. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad berakhir, selisih antara investasi mudharabah (setelah

dikurangi penyisihan kerugian investasi) dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

3. Pengukuran Mudharabah

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
- b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah; dan
 - (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika sebagian investasi mudharabah

hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

4. Mudharabah Musytarakah

Dalam PSAK No. 105, akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Jika pengelola dana menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.

Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
- b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

D. Prinsip Akuntansi Syariah: Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah atau biasa dikenal dengan Bank Islam mempunyai sistem operasi di mana bank ini tidak mengandalkan sistem bunga, seperti di bank-bank konvensional. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank

tanpa bunga ini, biasa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-hadis.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bank syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dalam kegiatan penghimpunan dan maupun penyalurannya berdasarkan pada prinsip syariah.

Prinsip Syariah menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Keadilan merupakan konsep lengkap yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil.

Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Kalau kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan.

Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan muamalat. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidak-adilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, perlakuan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok mesti dijadikan fokus perhatian adalah manakah metode yang adil dan menggambarkan apa yang

telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku yang dialami. (Harahap, 2002:183).

Unsur-unsur keadilan dalam sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mencakup nilai keadilan dalam Islam, dalam buku Baidhawry (2007:110) Keadilan dibagi menjadi dua lingkup, yakni: pertama, keadilan kuantitatif yang berhubungan dengan segala hal yang dapat diukur secara inderawi seperti timbangan, takaran, ukuran, dan distribusi barang dan jasa; dan kedua, keadilan kualitatif sebagai pola yang dipergunakan untuk mendesain pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hukum, undang-undang, dan kepemilikan.

Terhadap persepsi yang menganggap sistem bagi hasil pada bank syariah yang ternyata nisbah bagi hasilnya lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional adalah suatu persepsi yang keliru, karena pada bank syariah memiliki perhitungan yang bersifat pasti. Apabila besarnya laba dihitung besar, maka bagi hasilnya pun juga besar dan hal ini tidak mempengaruhi pendapatan peminjam modal, karena untung yang didapatkannya juga besar. Ini berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi / bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam pembagian nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Karim, 2001:57).

Dengan berlandaskan kerangka *teori fiqh mu'amalah* (syariah) maka dapat dinyatakan, bahwa sistem bunga masuk dalam kategori ruang lingkup

ketidakpastian (*gharar*). Secara operasional perbedaan bunga dan nisbah bagi hasil dapat dijabarkan melalui kerangka penjelasan gambar 1 berikut ini.



Ket: PBHS : Penentuan Bagi Hasil *Shahibul maal*

PBHM : Penentuan Bagi Hasil *Mudharib*

S : Supply (Penawaran modal)

D : Demand (Permintaan modal)

Gambar 2.1. Kurva Penentuan Bagi Hasil dalam Skema *Mudharabah*

(Sumber: Anto, 2003)

Kurva S menunjukkan kurva penawaran modal dari para *shahibul maal* atau *productivity adjusted demand*. Sementara D adalah kurva permintaan modal dari para *mudharib* atau *scarcity adjusted demand*. Istilah *productivity adjusted demand* digunakan karena basis dari permintaan modal dari para *mudharib* adalah produktifitas/kewirausahaannya. Sementara itu pertimbangan adanya keterbatasan dalam penyediaan modal mendorong digunakannya istilah *scarcity adjusted demand*.

Sumbu horisontal bawah menunjukkan porsi permodalan dari *shahibul maal*. Sedangkan sumbu horisontal atas menunjukkan porsi kontribusi kewirausahaan dari *mudharib*. Sumbu vertikal sebelah kiri menunjukkan nisbah bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal*. Sedangkan sumbu sebelah kanan menunjukkan nisbah yang diterima oleh *mudharib*. Kurva penawaran S memiliki lereng positif, yang berarti semakin tinggi porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal*, maka akan semakin meningkat kesediaannya untuk menawarkan modal. Di sisi sebaliknya, kenaikan porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal* ini berarti menurunnya porsi yang diterima oleh *mudharib*. Karenanya kurva permintaan D berlereng negatif, yang berarti meningkatnya porsi bagi hasil yang diterima *shahibul maal* berdampak mengurangi permintaan modal dari para *mudharib*. Tingkat nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan kurva penawaran S dan permintaan D. Dalam gambar 1 di atas perpotongan ini menghasilkan nisbah bagi hasil 40 : 60, yaitu 40 persen untuk *shahibul maal* dan 60 persen untuk *mudharib*. Analisis seperti ini akan berlaku dalam kasus terdapat keuntungan (*positive return*) dari kerjasama tersebut. Dalam kasus terjadi kerugian (*negative return*), maka *shahibul maal* akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan *mudharib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. *Mudharib* menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat keuntungan dan kerugian (*zero return*), maka tidak ada pembagian apapun di antara keduanya. Dengan demikian, dalam *mudharabah*

harga modal (*price of capital*) akan ditentukan bersama- sama dengan harga dari kewirausahaan (*price entrepreneurship*).

Penjelasan di atas berlaku pada pembagian nisbah bagi hasil, baik itu konsep Net Revenue Sharing (NRS) maupun Profit and Loss Sharing. Hal ini dikarenakan kedua konsep tersebut memiliki konsep bagi hasil yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada pendistribusian bagi hasilnya. Pada konsep NRS perhitungan biaya operasional tidak ditanggung oleh mudharib, hanya pengeluaran dalam bentuk HPP lah yang diakui sebagai pengeluaran (beban) dan dapat mengurangi besarnya nisbah bagi hasil. Lain halnya dengan konsep PLS, dalam konsep PLS semua biaya yang dikeluarkan selama proses usaha merupakan tanggungan mudharib dan dapat mengurangi besarnya nisbah bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) akan merasa puas karena hasil yang diterima masing-masing sesuai dengan kontribusi yang diberikan dan tingkat resiko yang ditanggung.

Dalam kaidah fiqh muamalah dikatakan bahwa “*al ghurmu bil al ghunmi*”, resiko itu menyertai manfaat, ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas dhohor atau ghurmu serta dhoman yang akan terjadi.

Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “*al khoraju bidzomaan*” yang “artinya hak memperoleh keuntungan (pendapatan/manfaat) adalah imbalan dari liabilitas (kesedian menanggung kerugian)” (HR. Abu Dawud

no.3044, At-Tirmidzi no. 1206, An-Nasa'i no. 4414, Ibnu Majah no.2234, Ahmad no. 24806). Hadits ini menunjukkan bahwa apa-apa yang keluar (*kharaj*) dari sesuatu barang yang telah dibeli adalah hak bagi pihak pembeli (bukan hak penjual). Hal ini dikarenakan pembeli itulah yang bersedia menanggung kerugian (*dhoman*), misalnya resiko kerusakan/cacat/hilang dari barang tersebut.

E. Konsep Bagi Hasil: Net Revenue Sharing dan Profit And Loss Sharing

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*) (Adiwarman Karim, 2004).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

1. Bagi untung (*profit sharing*)

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana

pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam system *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

Hardiwinoto (2011) menjelaskan bahwa penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana mudharabah mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian mudharib sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Bank syariah juga harus secara transparan menyampaikan biaya pengelolaan dana mudharabah, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana mudharabah baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai

institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana mudharabah dimana bank sebagai mudharib.

- a. Laporan hasil usaha mudharabah (bank sebagai mudharib). Laporan hasil usaha mudharabah ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana mudharabah mutlaqah yang telah dipercayakan shahibul maal (deposan) kepada bank syariah sebagai mudharib.
 - b. Laporan laba rugi bank syariah (bank sebagai institusi keuangan syariah). Data-data yang ada pada laporan ini adalah data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana mudharabah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
 - 1) Pendapatan bank sebagai mudharib. Pendapatan yang ada dalam laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana mudharabah yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri.
 - 2) Pendapatan operasi adalah pendapatan yang sama dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.
 - 3) Beban operasi adalah beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.
2. Bagi hasil (*revenue sharing*)

Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (profit). Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiwinoto (2011) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yangnng dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ijaroh. Besarnya pendapatan

yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) ini adalah pendapatan (revenue) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

- b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution.
- c. Pendapatan operasi lainnya yaitu fee administrasi atas penyaluran dana yang besarnya disepakati antara bank dan debitur (mudharib). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan fee inkaso, fee transfer, dan fee kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.
- d. Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai mudharib, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai mudharib.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan" (Muhammad, 2004). Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab, semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek (Muhammad, 2004).

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagikan antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka (Fatwa DSN, 2001).

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada

periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan (Muhammad Ridwan, 2004).

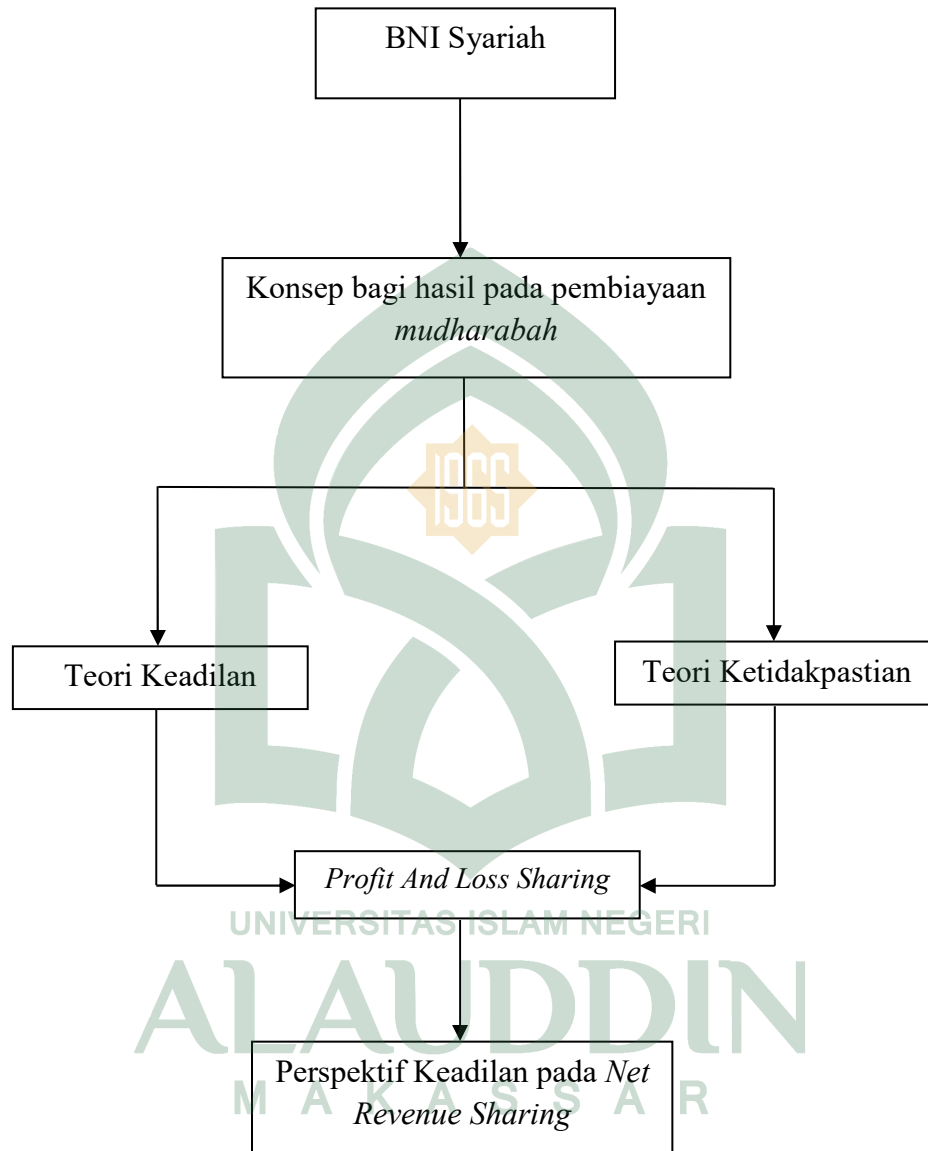
F. Rerangka Pikir

Penelitian ini secara khusus membahas tentang pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syariah. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Melalui pembiayaan mudharabah, nasabah mempercayakan dananya kepada bank syariah dan kemudian dana ini akan dikelola oleh bank syariah sehingga mendapatkan hasil usaha yang akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Pembagian nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada bank syariah menggunakan dua konsep yaitu *Net Revenue Sharing* Dan *Profit And Loss Sharing*. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki kekurangan, tapi tak dapat dipungkiri bahwa masalah keadilan pembagian nisbah antara mudarib dan shahibul maal adalah salah satu masalah yang perlu dikaji.

Berdasarkan uraian landasan teori mengenai konsep mudharabah: perspektif keadilan terhadap *net revenue sharing* pada perbankan syariah, peneliti merumuskan paradigma pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2
Rerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi kasus. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan, pertama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual dan pemikiran – pemikiran yang mendalam dalam mengkaji permasalahan yang ada. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiah. Menurut Sudjana (2009) pemikiran kualitatif menghasilkan deskriptif dan analisis tentang kegiatan, proses, atau peristiwa – peristiwa penting. Penelitian ini akan menganalisis tentang konsep *mudharabah*: perspektif keadilan pada *net revenue sharing* pada Bank BNI Syariah Makassar.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data – data dari Bank BNI Syariah cabang Makassar yang berlokasi di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Indonesia sebagai salah satu Bank Syariah dimana masyarakat Makassar memiliki keragaman budaya, suku, agama maupun kepercayaan, sehingga tentu memiliki permasalahan yang perlu dikaji secara ilmiah agar memudahkan masyarakat yang membutuhkan pemahaman bagi perkembangan sebuah bank yang berdasarkan pada Syari'ah dengan sistem bagi hasil.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studikasus. Pendekatan studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengaambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang tepat untuk dapat mengungkapkan mengapa dan bagaimana bagian, komponen, atau unit tersebut saling berkaitan untuk membentuk fungsi. Metode tersebut harus mampu menggali fakta dari berbagai sumber data, menganalisis dan menginterpretasikannya untuk mengangkat substansi mendasar yang terdapat dibalik kasus yang diteliti.

C. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data Primer (Primary Data), Pemenuhan kebutuhan data primer secara tepat menjadi langkah awal penentuan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data primer pada dasarnya adalah berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan informan. Informan yang akan dijadikan sumber data dalam kajian ini berjumlah dua kelompok informan, yang terdiri dari pak Adlan selaku kepala bagian pembiayaan dan Ibu Winda selaku asisten kepala bagian pembiayaan pada Bank BNI Syariah Makassar.

D. Metode pengumpulan data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu

mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat perekam) terhadap suatu obyek secara langsung sebagai informan penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk

mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data hasil wawancara serta data sekunder berupa kontrak mudharabah yang pernah dilakukan oleh entitas tersebut serta mekanisme pelaksanaannya yang berisi surat kontrak yang didokumentasikan.

4. Internet searching

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, karena pada awalnya fokus permasalahan dalam penelitian kualitatif belum jelas dan pasti. Peneliti dalam penelitian kualitatif harus memahami bagaimana metode penelitian kualitatif, menguasai wawasan pada bidang yang diteliti, serta siap untuk memasuki objek penelitian dan harus memiliki kesiapan baik secara logistik maupun akademiknya.

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian akan menjadi pihak yang terjun langsung ke lapangan serta harus berinteraksi dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini, serta pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan catatan lapangan berupa catatan

tertulis dan alat perekam. Seperti telah disebutkan sebelumnya pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Jadi, maksudnya adalah memilih sampel dari orang-orang atau pihak-pihak yang mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

F. *Teknik Analisis Data*

Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode interpretif. diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang di peroleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah. Karena penelitian ini menggunakan metode interpretif maka penyajian hanya sebatas pemaparan antara data yang diperoleh dengan teori untuk menjawab permasalahan.

3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas internal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*), dan realibilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (*confirmability*) pada aspek naturalis. Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua pengujian yang sesuai, yaitu uji *creadibility* (validitas internal), *transferability* (validitaseksternal).

1. ValiditasInterbal (*Credibility*)

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validitasinterbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan proses uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan

dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

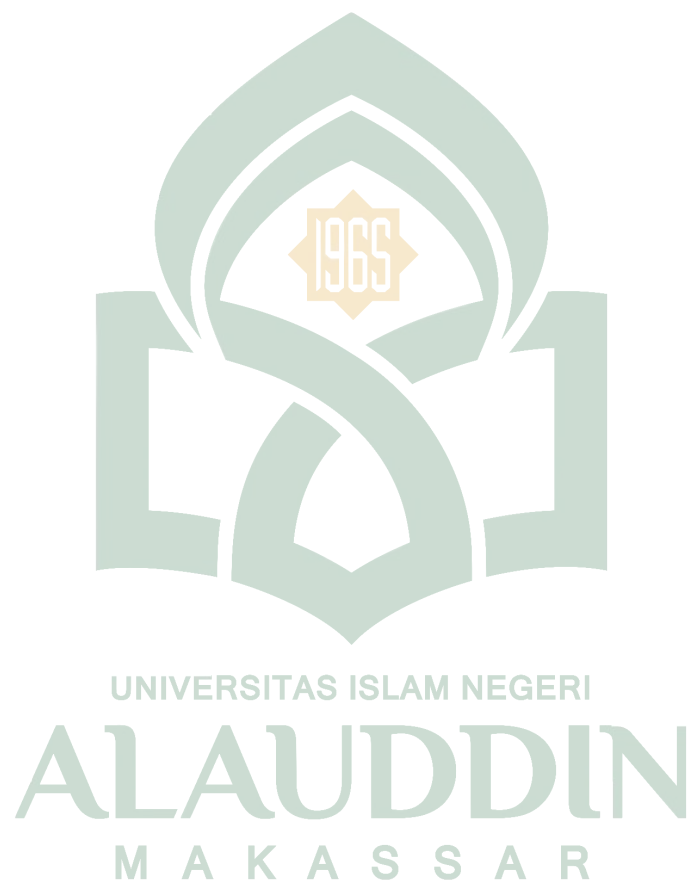
- a. Perpanjangan Pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.
- b. Meningkatkan Ketekunan, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
- c. Triangulasi, merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada.
 - 1) Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

- 2) Triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber data utama, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
- d. Menggunakan Bahan Referensi. Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud dapat berupa alat perekam suara, kamera, handycam dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.
- e. Diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten pada bidangnya dan mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga memperoleh kemandirian terhadap hasil penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan awal yang baik untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang dianggap kompeten.

2. Validitas Eksternal (*Transferability*)

Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang mirip dengan objek penelitian. Untuk mengetahui hal tersebut, maka pengujian

transferability perlu dilakukan guna memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil penelitian. Dengan demikian, generalisasi dapat dihindari oleh pembaca karena telah memahami seluk beluk data yang diperoleh dalam penelitian. Pembaca akan bijak untuk menerapkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan konteks dan situasi yang identik dengan penelitian yang dimaksud.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Bank BNI Syariah*

1. Sejarah singkat PT. Bank BNI Syariah

Terpaan kritis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menjadi suatu bukti ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil dengan berlandaskan pada undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor Cabang Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office Channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan operasional BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Corporate plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *Spin Off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *Spin Off* Bulan Juni 2010 tidak terlepas dari factor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Komitmen

pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan usaha perbankan syariah juga semakin meningkat.

Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang didalamnya termasuk rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan ekonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI tim Implementasi pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010. Sejak terbentuknya dari tanggal 19 Juni hingga September 2013 jumlah Cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 mobil layanan gerak dan 16 *paymen point*.

a. Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI

Terpaan kritis Moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan Maslahah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Pada tahun 1999 di bentuk tim proyek cabang syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan BNI Syariah yang beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai unit usaha syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya UUS BNI terdiri dari atas 5 kanton cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, UUS BNI mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang didalamnya sudah termasuk 50 rencana independensi BNI Syariah tahun 2009-2010.

Pada tahun 2005 proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan ekonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI, pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum

Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi cabang BNI, Jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga *Internet Banking*.

b. Pemisahan (*spin Off*) Unit Usaha Syariah BNI

Proses *Spin Off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 februari 2010 perihal izin prinsip pendirian PT Bank BNI Syariah, pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta pendirian PT Bank BNI syariah yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Manteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574. AH.01.01, Tanggal 25 Maret 2010.

Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP. GBI/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Setelah izin tersebut selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 9 Juni 2010 hingga September 2013 jumlah Cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 16 *payment point*.

Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan *Spin Off* UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:

1) Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk industri perbankan syariah perbankan syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, peraturan Bank Indonesi Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesi Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah dimasa depan.

2) Aspek Internal

Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya, dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen.

Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen.

Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya *spin off*:

1. Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industry perbankan syariah.
2. Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestic maupun global.
3. Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis.
4. Semakin mudah berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis kedepannya.
5. Pemisahan (*spin off*) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktivitas bisnis yang lebih baik.

Dan aspek strategis dengan dilakukannya *spin off* diharapkan akan memberikan sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain:

- a) Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah.
- b) Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra.
- c) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- d) Meningkatkan struktur permodalan
- e) Memberikan manfaat bagi pemegang saham
- f) Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah
- g) Mempertajam kompetensi insane perbankan syariah.

2. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah

a. Visi BNI Syariah

Visi BNI Syariah adalah “ menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

b. Misi BNI Syariah

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Tata Nilai dan Budaya Kerja PT Bank BNI Syariah

Tata nilai dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam berperilaku dalam sebuah organisasi menjadi bagian penting bagi pencapaian tujuan yang ingin dicapai dan keberlangsungan suatu organisasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab PT Bank BNI Syariah berpedoman pada dasar hukum syariah yaitu Al-Qur'an dan hadits, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai dan keyakinan dalam berperilaku ini dirumuskan dalam budaya kerja PT Bank BNI Syariah yaitu; amanah dan jamaah.

a. Amanah

- 1) Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal.
- 2) Profesional dalam menjalankan tugas.
- 3) Memegang teguh komitmen dan tanggung jawab.
- 4) Jujur, adil dan dapat dipercaya.
- 5) Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan

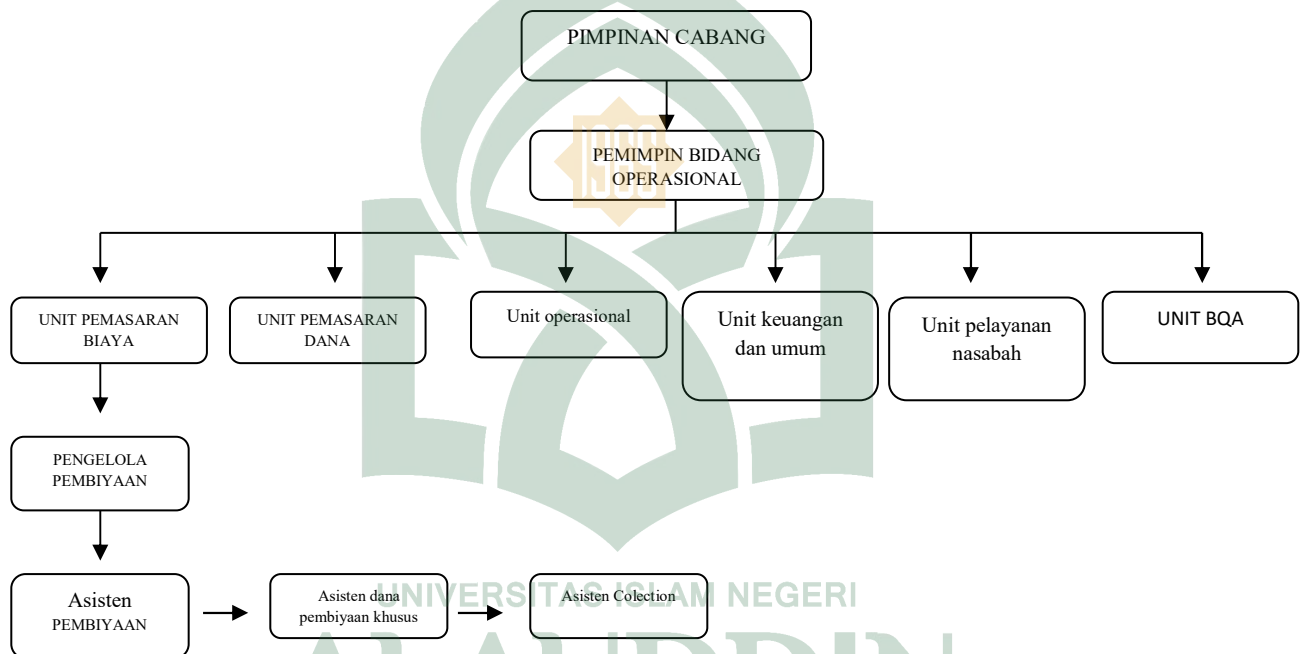
b. Jamaah

- 1) Bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung kewajiban
- 2) Bekerja secara rasional dan sistematis
- 3) Saling mengingatkan dengan santun.
- 4) Bekerjasama dalam kepentingan yang efektif.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas PT Bank BNI Syariah

Gambar 4.1

Struktur organisasi



B. Alur *Mudharabah* Pada PT BNI Syariah Makassar

PT Bank BNI Syariah menetapkan rukun *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang *mudharabah*. Adapun rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan produktif Bank BNI Syariah, yaitu:

1. Penyediaan dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum

2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara ekspelisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang dengan nilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* dalam jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak.
 - b. Bagi keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan oleh kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*moqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat dihalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharbah*, dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Selain rukun dan syarat yang mengikuti Fatwa DSN-MUI, Hasil wawancara yang dilakukan kepada asisten pembiayaan:

“Kriteria atau persyaratan calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah mereka yang usahanya telah dijalankan minimal dua tahun, legalitas usaha lengkap dan menurut analisa bank layak dalam arti layak bahwa usaha tersebut adalah usaha sendiri dan juga tidak terlepas dari penilaian bank terhadap karakter nasabah”.

Prosedur pembiayaan produktif pada PT Bank BNI Syariah:

1. Nasabah datang ke Bank BNI Syariah untuk memperoleh pembiayaan, baik itu berupa pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif.

2. Selanjutnya akan ditangani oleh bagian Asisten Pembiayaan, disini calon nasabah akan diberikan informasi mengenai pembiayaan yang cocok dengan keperluan calon nasabah, wawancara awal dan permintaan berkas yang diperlukan bank.
3. Dari bagian asisten pembiayaan berkas selanjutnya diberikan ke bagian operasional untuk diperiksa kelengkapan berkas dan calon nasabah dan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas calon nasabah dikembalikan ke asisten pembiayaan
4. Setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diberikan ke penyedia pembiayaan untuk kemudian diperiksa kelengkapan berkas calon nasabah, jika sudah lengkap maka akan dilanjutkan ke pimpinan cabang tetapi jika belum akan dikembalikan ke asisten pembiayaan untuk dilengkapi
5. Pimpinan cabang akan menverifikasi berkas calon nasabah dan akan memberikan pendapat tentang pengajuan pembiayaan calon nasabah.
6. Selanjutnya dikembalikan ke asisten pembiayaan untuk diperiksa dan dilengkapi kembali jika ada berkas yang masih harus dipenuhi calon nasabah dan menanggapi pendapat yang diberikan pimpinan cabang.
7. Selanjutnya diberikan ke penyedia pembiayaan untuk diperiksa kelengkapannya dan melihat tanggapan asisten atas pendapat pimpinan cabang.
8. Dilanjutkan ke pimpinan cabang untuk pemeriksaan dan pengambilan keputusan pimpinan cabang untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan calon nasabah.
9. Diberikan ke wakil pimpinan cabang untuk dipelajari dan diperiksa kelengkapan berkas calon nasabah.

10. Jika pimpinan cabang sepakat untuk memberikan, maka akan dikembalikan ke asisten pembiayaan untuk ditindak lebih lanjut.
11. Selanjutnya dari asisten pembiayaan akan diberikan ke bagian operasional untuk diproses pemberian pembiayaan serta pelaksanaan ijab-qabul antara bank dan nasabah.

Alur pembiayaan yang telah dijelaskan diatas adalah alur pembiayaan sebelum pihak bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Akan tetapi banyak juga nasabah yang sebelum diberikan pembiayaan sudah mundur karena beberapa alasan, seperti yang dijelaskan oleh asisten pembiayaan:

“Persyaratan yang menjadi kendala bagi calon nasabah untuk memenuhi persyaratan tersebut adalah legalitas usahanya, jaminan yang akan diberikan dan tidak memperhatikan sistem administrasinya, dan memang banyak calon nasabah yang tidak mampu memenuhi persyaratan sehingga mereka mundur dengan sendirinya”.

Jika berbicara tentang jaminan, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak diperbolehkan minta jaminan kepada pihak *mudharib*, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Dan jaminan tersebut hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Sebenarnya tiap bank memiliki kebijakan masing-masing terkait prosedur yang harus dilalui sampai seorang nasabah berhak mendapatkan pembiayaan tersebut. Seperti pada PT Bank BNI Syariah tidak semua nasabah *mudharabah* wajib memberikan jaminan. Seperti yang dikatakan oleh asisten pembiayaan:

“Jaminan merupakan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Tapi ada pembiayaan yang tanpa jaminan sama sekali seperti jika bank memiliki keyakinan potensi bisnis dan karakter dari nasabah”.

Menurut karim (2011) penentuan angsuran pokok dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembiayaan berjangka waktu dibawa satu tahun artinya pembiayaan pokok pembiayaan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
2. Pembiayaan berjangka waktu diatas satu tahun artinya pembiayaan pokok dengan jangka waktu lebih dari satu tahun wajib diangsur secara proporsional (pembayaran angsuran sesuai dengan arus kas dari usaha nasabah) selama jangka waktu pembiayaan.

Angsuran pokok tersebut juga diterapkan pada pembiayaan produktif yang merupakan pembiayaan yang bersifat kerja sama. Didalamnya terdapat hubungan antar dua pihak yang saling bersepakat untuk bersama-sama membangun usaha yang salah satunya bertindak sebagai penyedia modal usaha dan yang satunya bertindak sebagai penyedia modal usaha dan yang satunya lagi sebagai pihak yang menjalankan usaha/pengelola usaha. Dalam hal ini Bank BNI Syariah hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan *shahibul maal* dan *mudharib*. Karim (2004:211) menjelaskan hubungan ini disebut investasi tidak langsung.

Sulitnya Bank BNI Syariah mengetahui karakter calon nasabah/*mudharib* yang akan menerima pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Permasalahan ini lebih ke calon nasabah yang baru, untuk nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan pada Bank BNI Syariah, baik itu pembiayaan konsumtif atau produktif, pihak bank akan lebih mudah memperoleh informasi *mudharib*. Untuk nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya, bank hanya perlu mengetahui tentang informasi yang belum ada sebelumnya, baik itu mengenai usaha yang akan dibiayai, prediksi mengenai kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan jaminan yang akan dijamin jika terjadi wanprestasi.

Bank BNI Syariah dalam menyeleksi calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* sangat ketat. Bank BNI Syariah bahkan menambah beberapa syarat dan kriteria tertentu untuk calon nasabah pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Hasil wawancara dengan asisten pembiayaan menyatakan:

“Untuk pembiayaan dengan akad *mudharabah*, pihak bank menetapkan kriteria yang lebih ketat. Bank BNI Syariah bahkan hanya memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada nasabah sebelumnya sudah pernah memperoleh dengan akad *murabahah* (jual-beli) atau *musyarakah*. Hal ini disebabkan sulitnya bank mengetahui dengan pasti karakter nasabah yang akan diberikan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu bank lebih memilih nasabah dengan usaha yang tingkat kepastiannya lebih tinggi.”

Bank BNI Syariah sudah diterapkan, hal ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan bagi hasil. Nantinya dengan informasi mengenai kriteria nasabah dan usahanya tersebut pihak Bank BNI Syariah akan menentukan rasio bagi hasil antara keduanya. Penentuan rasio bagi hasil ini nantinya akan dipengaruhi salah satunya oleh informasi mengenai karakter nasabah dan usaha yang akan dijalankan. Sehingga dapat meningkatkan jumlah pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah*.

Bank BNI Syariah akan melihat berapa perkiraan jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan nantinya dari usaha yang akan dijalankan nasabah. Bank BNI Syariah juga akan melihat rasio bagi hasil yang harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dananya, karena bank nantinya juga akan membagikan hasilnya kepada nasabah penyimpan dana di Bank BNI Syariah. Bagi hasil dengan pembiayaan dengan akad *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh pengungkapan karakter dan prospek usaha nasabah yang akan dibiayai.

Pengungkapan karakter yang benar akan membantu pihak bank BNI Syariah dalam menetapkan rasio bagi hasil yang sesuai dengan harapan yang diinginkan nasabah dan pihak bank. Pemberian insentif yang adil bagi nasabah,

akan menciptakan suatu bagi hasil yang optimal, yaitu dapat memenuhi harapan yang diinginkan kedua belah pihak. Level upaya yang dapat dilakukan *mudharib* dapat dinilai dari informasi mengenai karakter nasabah dan usaha nasabah. Bank dalam hal ini lebih mudah menilai level upaya yang dilakukan *mudharib*, karena dari informasi yang didapatkan bank pada saat proses menyeleksi nasabah, bank dapat menilai kemampuan yang dapat dilakukan nasabah. Oleh karena itu bank harus dapat membuat bagi hasil yang membuat level upaya *mudharib* meningkat.

Bank harus dapat membuat bagi hasil yang membuat level upaya *mudharib* meningkat karena meningkatnya level upaya *mudharib* akan berdampak pada meningkatnya *profit* yang dihasilkan. Sehingga bagi hasil kepada bank juga meningkat. Sebab BNI Syariah dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* tidak ingin mengambil resiko yang terlalu besar. Jadi, dalam menetapkan rasionya Bank BNI Syariah hanya dapat menetapkan rasio baginya suatu tingkat standar referensi keuntungan yang ditetapkan manajemen bank. Padahal Bank BNI Syariah bisa saja menetapkan rasio bagi hasil untuknya lebih tinggi. Hal ini dilakukan Bank BNI Syariah agar utilitas nasabah dapat terpenuhi.

Hal lainnya yang mempengaruhi rasio bagi hasil adalah besarnya nilai pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Semakin besar nominal pembiayaan yang diberikan dan semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank syariah. Bank BNI Syariah dalam hal ini akan menaikkan rasio bagi hasil untuknya. Selain itu, untuk menilai produktivitas nasabah dalam menghasilkan pendapatan, Bank BNI Syariah akan melihat pendapatan yang dihasilkan nasabah pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam mengefisienkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Level upaya yang dilakukan nasabah nantinya akan berdampak pada produktivitas nasabah dalam menjalankan usahanya yang dibiayai oleh bank syariah.

Untuk menetapkan bagi hasil yang optimal pada pembiayaan dengan akad *mudharabah*, pihak Bank BNI Syariah sangat dipengaruhi oleh pengungkapan informasi mengenai karakter nasabah dan usahanya. Sedangkan level upaya dan produktivitas nasabah dalam menjalankan usahanya sangat berpengaruh pada seberapa besar rasio yang akan didapatkannya dari pendapatan nantinya, semakin maksimal dan produktivitasnya naik. Dengan demikian, nasabah dalam pemberian informasi mengenai karakter dirinya dan informasi mengenai usahanya diharapkan jujur dan benar. Karena dengan pengungkapan yang benar, pihak Bank BNI Syariah dapat menetapkan rasio bagi hasil yang adil bagi nasabah. Rasio bagi hasil yang ditetapkan diharapkan bisa memenuhi utilitas kedua belah pihak, baik bagi pihak Bank BNI Syariah dan nasabah pembiayaan. Sehingga nantinya upaya yang dilakukan nasabah dalam menjalankan usahanya dapat semaksimal mungkin.

Penetapan rasio bagi hasil yang adil bagi kedua belah pihak nantinya juga berpengaruh pada pelaporan pendapatan dari hasil usaha yang dibiayai. Nasabah diharapkan melaporkan hasil usahanya dengan jujur sehingga bank BNI Syariah tidak perlu mengeluarkan biaya pengawasan dan verifikasi yang tinggi untuk memeriksa laporan pendapatan nasabah, karena setiap biaya yang dikeluarkan nantinya akan berpengaruh pada pendapatan yang akan dibagikan antara pihak Bank Syariah dan nasabah pembiayaan.

Maka pihak bank syariah dalam menetapkan bagi hasil harus bisa memenuhi harapan nasabah, hal ini nantinya berdampak pada pengungkapan karakter nasabah yang jujur, level upaya yang dilakukan *mudharib* lebih maksimal dan meningkatkan *profit* yang dihasilkan *mudharib* yang nantinya pihak bank juga mendapatkan bagi hasil yang besar dari *profit* yang dihasilkan. Perlunya membuat rasio bagi hasil yang dirasa adil bagi *mudharib* (dalam hal ini tingkat rasio bagi

hasil sesuai dengan harapan *mudharib*) nantinya dapat mendorong level upayanya dan meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan dalam melaporkan pendapatannya.

Oleh karena itu, pengungkapan karakter nasabah dan level upaya yang maaksimaln nantinya dapat menekan biaya pengawasan dan verifikasi yang harus dikeluarkan dalam kontrak *mudharabah*, sehingga *profit* yang dibagi nantinya juga meningkat. Dan kemudian ketika BNI Syariah mendukung pembiayaan *mudharabah* dimana pembiayaan diarahkan lebih kepada sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, bagi pemilik dana, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Sedangkan bagi pengelola dana, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi. Hasil wawancara dari kepala bagian pembiayaan menyatakan.

“PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah lababruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jikaberdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit), yaitulaba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.”

C. Prinsip Pelaksanaan Keadilan Dalam *Profit And Loss Sharing* Pada PT Bank BNI Syariah Makassar

PT Bank BNI Syariah menggunakan beberapa akad yang sesuai dengan syariah islam, yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Untuk akad *mudharabah* bank sebagai penyettor modal usaha 100% kepada pengelola usaha/nasabah. Sedangkan akad *musyarakah*, bank hanya menyettor sebagian modal dari

keseluruhan modal yang dibutuhkan nasabah dalam menjalankan usahanya karena nasabah sendiri telah memiliki modal usaha dan bank sebagai penyedia sebagian lagi modal nasabah.

Kedua akad tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* menggunakan sistem bagi hasil dalam perhitungannya. Hasil wawancara dari kepala bagian pembiayaan:

“Bank BNI Syariah menentukan bagi hasil berdasarkan laba/keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Yaitu sistem perhitungan bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).”

Dalam akad *mudharabah* ini juga tercipta suatu keadilan bagi pihak-pihak yang menjalankannya. Menurut Tarsidin (2010:6) pada level makro bagi hasil dinilai lebih baik daripada skema bunga karena bagi hasil terbukti dapat meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki distribusi pendapatan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil pada pengguna bagi hasil tersebut. Hasil wawancara dari kepala bagian pembiayaan:

“Kedua metode *Mudharabah* Bank BNI Syariah Makassar lebih adil menggunakan *Net Revenue Sharing* karena kita hindari jangan sampai keuntungan bersihnya dia kecilkan dan biaya operasionalnya dia besarkan, sebenarnya tidak mungkin tpi alangkah baiknya dihindari bagi hasil yang diserahkan nanti, makanya Bank BNI Syariah orientasinya itu *Net Revenue Sharing* tersebut. Kalau kita pakai *Profit and Loss Sharing* siapa mau menjamin usaha nasabah benar adanya.”

Akan tetapi dalam akad *mudharabah* biasanya yang mendapatkan porsi bagi hasil tinggi adalah pihak bank (*shahibul maal*) sebagai pihak modal karena mereka yang siap menerima konsekuensi yang terjadi ketika usaha yang dijalankan oleh *mudharib* mengenai kegagalan. Hasil wawancara dengan kepala bagian pembiayaan:

“PT Bank BNI Syariah Makassar sebenarnya tidak ada ketentuan karena tergantung dari kondisi nasabahnya. Tapi biasanya dalam akad *mudharabah* ini pihak bank mendapatkan porsi yang lebih tinggi, bagi

hasil tersebut tidak jauh sekitar 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah. Dan kemudian pada PT Bank BNI Syariah Makassar ini juga melakukan sistem negosiasi kepada nasabah pada awal akad tersebut.”

D. Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* Pada PT Bank BNI Syariah Makassar

Dalam tahap Bagi Hasil Bank BNI Syariah menerapkan pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Referensi tingkat (marjin) keuntungan, yang dimaksud disini adalah tingkat margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset and Liability Committee)
2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai, perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Perkiraan penjualan
 1. Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan.
 2. Sales Turn-Over atau Frekuensi penjualan setiap bulan.
 3. Fluktuasi harga penjualan
 4. Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan.
 5. Margin keuntungan setiap transaksi
 - b. Lama *cash to cash cycle* artinya terkait dengan lama proses barang, lama persediaan dan lama piutang.

- c. Perkiraan biaya-biaya langsung yang dimaksud biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *cost of goods sold* (COGS).
- d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung, yang dimaksud biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, gaji karyawan, dan sebagainya.

Delayed factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan yakni:

1. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan, dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, perkiraan biaya-biaya langsung, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya tidak langsung dan *delayed factor*.
2. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan, dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat. Hal ini dapat dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung dan *delayed factor*.

3. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan, dalam hal ini nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle* dan *delayed factor*

Nisbah bagi hasil ke LKS mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di BNI Syariah. PT Bank BNI Syariah juga menggunakan dua bentuk *mudharabah* pada produk pembiayaan, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. PT Bank BNI Syariah menggunakan akad *mudharabah* dalam pembiayaan produktifnya karena pembiayaan produktif bersifat kerjasama, yaitu kerjasama antara bank sebagai *shahibul mall* dan nasabah sebagai *mudharib*. Sehingga akad yang sesuai dan dapat digunakan dalam pembiayaan produktif berdasarkan syariah islam adalah akad *mudharabah*. Hasil wawancara dengan bagian asisten pembiayaan:

“Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal/Bank (*shahibul mall*) menyediakan modal 100% sedangkan *mudharib*/nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak.”

Hal ini juga sesuai dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*/LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Bank BNI Syariah dalam menyalurkan dananya dengan akad *mudharabah* sangat selektif dan biasanya jangka waktu yang diberikan pendek. Akad *mudharabah* memiliki tingkat resiko yang paling tinggi karena nasabah diberikan 100% modal dari pihak bank syariah dan kemudian pendapatan yang diterima bank tidak tetap dikarenakan pendapatan yang diterima dihitung berdasarkan porsi bagi hasil yang telah ditetapkan di awal akad

Resiko yang dihadapi bank BNI Syariah dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan resiko yang disebabkan karena adanya hubungan *principal-Agent*, yaitu hubungan antara bank sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dalam kontrak *mudharabah* ini, akan terjadi *Asymmetric Information* yaitu tidak seimbangnnya informasi yang diterima bank dibandingkan informasi yang dimiliki nasabah. Hal ini disebabkan karena nasabah dalam kontrak ini lebih mengetahui informasi tentang usaha yang ia jalankan, sedangkan bank syariah hanya dapat melihat usaha tersebut dari luar dan tidak ikut campur tangan terhadap usaha yang dijalankan.

Tingginya resiko yang dihadapi dalam mengguakan akad *mudharabah* dalam pembiayaan produktif meyebabkan Bank BNI Syariah menerapkan standar analisis yang lebih ketat dibandingkan dengan akad *murabahah* dan akad *musyarakah*. Permasalahan *adverse selection* yang dihadapi Bank BNI Syariah dalam hal ini adalah sulitnya mengetahui karakter nasabah yang sesungguhnya dan kemampuan nasabah yang sesungguhnya dalam menjalankan usaha yang diberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Bank BNI Syariah dalam menyeleksi calon nasabah hanya mengandalkan pada verifikasi informasi mengenai data diri calon nasabah yang dibuatnya. Untuk dapat mengetahui dengan benar mengenai informasi yang diberikan calon nasabah

kepada bank sebagai *shahibul mall*, bank harus mengeluarkan biaya verifikasi yang tinggi untuk memeriksa dan menetapkan kebenaran mengenai informasi calon nasabah. Verifikasi dengan biaya yang tinggi tidak akan dilakukan bank karena hanya menghasilkan pendapatan yang kecil bagi pihak bank, sebab tingginya biaya verifikasi.

Masalah lain yang dihadapi Bank BNI Syariah yaitu mengenai usaha yang diajukan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank sebagai *shahibul maal*. Dalam hal ini, bank harus menganalisis kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha yang akan diberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan menganalisis serta memprediksi usaha yang akan dimodali. Untuk menghasilkan profit, nasabah harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan usaha yang akan dimodali pihak bank dapat menghasilkan profit dan dapat memiliki prospek yang bagus kedepannya. Bank akan memprediksi profit yang akan dihasilkan oleh usaha nasabah, karena bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya memiliki tingkat profit yang diinginkan bank syariah dalam menyalurkan dananya, jika pihak bank syariah melihat bahwa usaha yang akan dibiayai tidak mampu menghasilkan profit seperti yang diinginkan bank, maka bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah/*mudharib* tersebut.

Calon nasabah dalam mengajukan pembiayaannya akan berusaha meyakinkan pihak bank bahwa dirinya layak mendapatkan pembiayaan dengan memberikan informasi yang bagus kepada bank, nasabah kemungkinan akan memberikan informasi yang tidak sesuai untuk meyakinkan bank. Wawancara dari asisten pembiayaan:

“Bank terkadang sulit untuk mendapatkan informasi yang 100% akurat mengenai data diri serta dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh nasabah. Bank harus memverifikasi data yang diberikan oleh nasabah salah satunya dengan menghubungi orang terdekat dari nasabah dan mengecek langsung usahanya yang akan dibiayai jika usaha tersebut telah berjalan. Untuk usaha yang baru akan dimulai, bank dapat melihat lokasi

serta kebutuhan lain yang diperlukan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Jaminan juga harus dicek kepemilikannya dan ditaksir harganya dengan benar.”

Hal utama yang perlu bank perhatikan adalah memastikan bahwa nasabah menjalankan usaha tersebut sesuai dengan syariah islam. Usaha yang nantinya akan dibiayai juga harus sesuai dengan syariah islam. Nasabah bisa saja memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan *profit* tetapi itu harus sesuai dengan syariah islam, karena bisa saja nasabah melakukan perjudian atau menipu hanya untuk mendapatkan *profit* yang tinggi. Meskipun usaha tersebut memiliki prospek yang baik dalam menghasilkan laba, misalnya rumah judi dan berjualan minuman keras tetapi usaha tersebut dilarang dalam syariah islam.

Untuk beberapa kondisi, bank harus melakukan *monitoring* yang ketat kepada *mudharib* untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar akibat menurunnya hasil yang diperoleh *mudharib*. Dalam hal ini *mudharib* bisa saja melakukan hal-hal yang menyimpan batasan-batasan yang diberikan oleh bank sehingga usaha tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan bank dan akan berdampak pada bagi hasil yang tidak sesuai dengan yang diprediksi bank sebagai *shahibul maal* bahkan bisa saja usaha tersebut rugi. Wawancara dengan asisten pembiayaan:

“Bank hanya dapat melakukan program monitoring yang standar dalam mengawasi nasabah sebagai *mudharib*, misalnya memeriksa laporan berkala tiap bulan mengenai hasil yang diperoleh dari usaha *mudharib*. Tetapi ketika terjadi perubahan yang signifikan dari hasil yang dilaporkan *mudharib*, maka bank sebagai *shahibul maal* akan melakukan monitoring yang lebih ketat kepada *mudharib*. Hal ini berkaitan dengan modal yang diberikan bank untuk usaha tersebut, supaya bank dapat mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Misalnya *mudharib* melakukan kelalaian dalam mengelola usahanya sehingga menyebabkan kerugian. Bank dalam hal ini tidak ingin modal yang disetornya untuk usaha tersebut habis, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak bisa maka bank sebagai *shahibul maal* akan melakukan monitoring yang lebih kepada *mudharib*.”

Selain masalah upaya *mudharib* yang tidak memaksimalkan menjalankan usahanya, pelaporan mengenai jumlah *profit* yang dihasilkan oleh usaha

kerjasama antara *shahibul mall* dan *mudharib* menjadi masalah yang dihadapi bank. Dalam hal ini, nasabah bisa saja melaporkan jumlah *profit* yang diperolehnya tidak sesuai dengan kebenarannya atau dengan kata lain *mudharib* memanipulasi laporan jumlah *profit* yang diperolehnya. Untuk mendapatkan laporan yang pasti mengenai jumlah *profit* yang dihasilkan, bank harus melakukan pemeriksaan yang tentunya akan memerlukan biaya. Penambahan biaya pemeriksaan ini nantinya akan berdampak pula pada kecilnya bagi hasil yang diperoleh, disebabkan tingginya biaya dalam mengawasi dan memeriksa setiap laporan mengenai hasil dari usaha yang dibiayai dengan akad *mudharabah*.

Wawancara dengan asisten pembiayaan:

“Jika nasabah mengalami kendala atau masalah dalam usaha yang dijalankan, maka bank juga menerima keluhan-keluhan tersebut. Artinya pihak bank terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi masalah *mudharib*? Jika bisa bank membantu dalam mencari solusinya, kemudian bank memberikan saran serta kebijakan kepada pihak *mudharib*. Akan tetapi jika masalah tersebut terletak pada karakter nasabah itu sendiri secara otomatis ada langkah khusus yaitu surat teguran dan lelang terhadap jaminan.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah dan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan yang terkait konsep *mudharabah*: perspektif keadilan terhadap *Net Revenue Sharing* PT Bank BNI Syariah Makassar. Melalui pembahasan Bab IV dapat dilihat bahwa selama ini PT Bank BNI Syariah Makassar telah melaksanakan aturan sesuai dengan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April tahun 2000 tentang *mudharabah*, karena selain usaha yang dibiayai adalah tidak lepas dari syariah. PT Bank BNI Syariah Makassar dengan nasabah terlebih dahulu saling bernegosiasi untuk menentukan nisbah yang akan diperoleh antara keduanya dalam melaksanakan akad *mudharabah*, artinya tidak semua nasabah sama bagi hasil yang didapatkan dan kemudian menggunakan sistem *Net Revenue Sharing* dalam bagi hasilnya.

Akan tetapi, PT Bank BNI Syariah Makassar dalam melaksanakan pembiayaan akad *mudharabah* terlalu berhati-hati dan sepertinya terlihat bahwa ada unsure kesengajaan meminimalkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*. Walaupun setiap tahun mengalami peningkatan tetapi tetap pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* lebih tinggi dibandingkan pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Bagi hasil yang sesuai dengan harapan nasabah adalah bagi hasil yang nantinya dapat menekan permasalahan tersebut. Karena hal ini akan berdampak pada pengungkapan karakter nasabah yang jujur, level upaya yang dilakukan *mudharib* lebih maksimal

dan meningkatkan *profit* yang dihasilkan *mudharib* secara otomatis pihak bank juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar dari *profiti* yang dihasilkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:

1. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan resiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaanya Bank BNI Syariah Makassar diharapkan bisa lebih memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* dari bank syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai bank syariah yang dijalankan prinsip-prinsip saseuai dengan syariah islam.
2. Meskipun pembiayaan dengan akad *mudharabah* memiliki resiko yang cukup tinggi, Bank BNI Syariah Makassar diharapkan bisa menekan resiko yang ada dengan cara menetapkan bagi hasil optimal yaitu yang sesuai dengan harapan nasabah dan bank syariah. Sebab jika harapan bank dan nasabah dapat disatukan dan dicapai, maka sulitnya menilai karakter nasabah, kurang maksimalnya upaya nasabah dalam menghasilkan profit dan kemungkinan nasabah melaporkan profit yang dihasilkan tidak benar yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat diatasi.
3. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pada Bank BNI Syariah Makassar, Bank BNI Syariah diharapkan dapat mengoptimalkan bagi hasil yang dapat memenuhi harapan nasabah dan juga sesuai dengan tingkat pendapatan yang diharapkan bank. Sebab dengan terpenuhnya utilitas pihak nasabah dan

Bank BNI Syariah, maka pemasalahan dapat ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan bagi hasil yang optimal. Meskipun Bank BNI Syariah dalam menerapkan pembiayaan Akad *mudharabah* sudah dapat memenuhi harapan yang diinginkan nasabah, Bank BNI Syariah bisa lebih meningkatkan jumlah pembiayaannya dengan akad *mudharabah*. Salah satunya dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang masih baru atau sebelumnya belum pernah mendapat pinjaman dari Bank BNI Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin.2011. Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 15(4): 523 – 547.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Pers. Jakarta
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2007. *Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial-Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal*. JP Books. Surabaya.
- Bank BNI Syariah. Wirausaha. <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kopkarkopeg> (diakses januari 2019).
- Bank BNI Syariah. lingkage. <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-lingkage> (diakses januari 2019).
- Bank BNI Syariah. Tunas Usaha. <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tunas-usaha> (diakses januari 2019).
- Bank BNI Syariah. Usaha Kecil. <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-usaha-kecil> (diakses januari 2019).
- Bank BNI Syariah. Wirausaha. <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-wirausaha> (diakses januari 2019).
- Beck, T, A. Demirgüç-Kunt, O.Merrouche. 2012. Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*. 37(2): 1- 42.
- Dar, H.A. and Presley, J.R. 2000. Lack of profit loss sharing in Islamic banking: management and control imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*. 2(2): 3-18.
- Efferin, Darmadji, dan Tan. (2004). *Metode Penelitian untuk Akuntansi. Sebuah Pendekatan Praktis*. Bayu Media. Malang, Jawa-Timur. Indonesia.
- Gustina. 2011. Islamic Banking System: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. 6(1): 67 – 77.
- Hafizah. 2004. Akuntansi Kapitalis dalam Kacamata Syariah: Suatu Catatan Aksiologis. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*. 11(1): 107 – 117.
- Harahap, Sofyan Syafri 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Qur'an, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. 2(2): 101 – 185.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2003. *Bunga Rampai Akuntansi Islam*. Pustaka Quantum Prima.

- Hardiwinoto. 2011. Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS PNM BINAMA Semarang (Kesesuaian Dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah). *Vallue Added - Manajemen Unimus*. 7(2): 46-67
- Hidayat. 2010. *Profit Sharing and Revenue Sharing*. Diunduh tanggal 3 Mei 2016. <http://tukarpena.blogspot.com>
- IkatanAkuntan Indonesia (IAI).2007.*PernyataanStandarAkuntansiKeuangan SyariahNo.105*.
TentangAkuntansiPerbankanSyariahTransaksiMudharabah. Jakarta: IAI.
- Ikhsan, A dan Iskhak, M 2005, “AkuntansiKeprilakuan, SalembaEmpat, Jakarta.
- Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Terjemahan oleh Anshari Thayib. Bina Ilmu. Surabaya.
- Junaidi, SH. 2006. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudhorobah pada Bank Syariah Mandiri (Study di Bank Syariah Mandiri Kudus). *PhD Thesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kamla, R. 2009. Critical Insight into Contemporary Islamic Accounting. *Critical Perspective on Accounting*. 20(8): 921-932.
- Karim, A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Bina Insani. Jakarta.
- Karim, A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *EtikaBisnisTuntutandanRelevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khasanah, Umrotul. 2010. Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*. 1(2): 120-132.
- Lind, E.A. and Tyler, T.R. 1988. *The Social Psychology of Procedural Justice*. New York: Plenum Press.
- Masse, 2010. Konsep Mudharabah. *Jurnal Hukum Diktum*. 8(1)
- Muthahhari, Murtadha.1995. *AsasPandanganDunia Islam*. Bandung: Mizan
- Nabhan, F.2010. Profit and Loss Sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi. *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1): 1-22
- Perbawa, Angga Triyoga. 2012. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Fakulatas Ekonomi Univesitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.
- Rahmanti, V.N., A.Kamayanti., dan Mulawarman AD. 2013. Menggeser Paradigma Stock Concept menuju Flow Concept: Kritik atas Net Revenue

Sharing pada Akad Mudharabah. *Dipresentasikan* pada Silatnas 3 Fordebi UNS.

Ratmono, Dwi. 2004. Pengungkapan Islamic Wives dalam Pelaporan Keuangan Bank Syari'ah Menurut Paradigma Akuntansi Syari'ah Filosofis-Teoritis dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan '59'. *Makalah*. Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II. PPBEI. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.

Rohmatin, Anisatur. 2008. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab Pati). *Skripsi*. Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan. Bandung.

Sudjana, Nana., 2009. Penilaian Hasil proses Belajar mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Susiana. 2010. Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Tarsidin. 2010. *Bagi hasil, konsep dan analisis*. Jakarta: lembaga penerbit FEUL.

Thibaut, J. and Walker, L. 1975. *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Hillside NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wiroso. 2011. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.

Yahya, Muchlis, dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Hearts Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. 1(1): 1-83.

Yulianti, R.T. 2009. Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*. 3(2): 151- 165.



L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

N

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan

Makassar, Selasa 29 Januari 2019

Bapak Fadlan

1. Berapa konsep bagi hasil pembiayaan *mudharabah* saat ini?

Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah Makassar tidak ada ketentuan karena tergantung dari kondisi nasabahnya. Tapi biasanya 60% dan 40%.

2. Bagaimana Bank BNI Syariah menentukan Bagi Hasil kepada Nasabah?

Bank BNI Syariah Makassar menentukan bagi hasil berdasarkan Laba/Keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Yaitu sistem perhitungan bagi hasil menggunakan metode (*Net Revenue Sharing*)

3. Apakah setiap nasabah bagi hasil yang didapatkan sama?

Tidak, setiap nasabah memiliki bagi hasil yang berbeda seperti yang saya katakana bahwa tergantung dari kondisi dan kesanggupan nasabah tersebut.

4. Bagaimana pelaksanaan keadilan dalam metode *Net Revenue Sharing*?

Bank BNI Syariah Makassar lebih adil menggunakan *Net Revenue Sharing* karena kita hindari jangan sampai keuntungan bersihnya dia kecilkan dan biaya operasionalnya dia besar-besarkan, sebenarnya tidak mungkin tpi alangkah baiknya dihindari bagi hasil yang diserahkan nanti, makanya Bank BNI Syariah orientasinya itu *Net Revenue Sharing* tersebut.

5. Bagaimana konsep *mudharabah* pada BNI Syariah?

Konsep *mudharabah* Bank BNI Syariah yaitu menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

6. Bagaimana akuntansi *mudharabah* pada Bank BNI Syariah?

Akad *mudharabah* memiliki tingkat resiko yang paling tinggi karena bank BNI Syariah memberikan modal kepada nasabah 100% murni dari Bank BNI Syariah. Dan menyerahkan laporan keuangan tiap bulannya.

7. Bagaimana *Net Revenue Sharing* dalam akad *mudharabah* pada BNI Syariah?

Misalnya kondisi ekonomi yang belum mendukung, karena memang *mudharabah* itu diseluruh dunia yang paling banyak diindonesia, yang pertama kerena sistem *mudharabah* itu agak susah karena yang menjalankan sistem *mudharabah* ini harus menguasai bisnis usaha yang dijalankan nasabahnya. Dan sekarang banyak bank-bank yang memilih sistem *murabahah* dan *musyarakah*, karena sistem *mudharabah* memiliki resiko yang sangat tinggi.

8. Alasanta tidak menggunakan *profit and Loss Sharing*?

Karena kalau kita menggunakan *profit and Loss Sharing* gampang memanipulasi laporan keuangannya seola-olah nasabah rugi, lagi pula kita sudah analisa diawal memprediksi keuntungan nasabah.

9. Bagaimana jika Bank BNI Syariah menggunakan *Net Revenue Sharing* dan mengalami kerugian! Apa tanggapan Bank BNI Syariah?

Kalau nasabah mengalami kerugian. Misalnya perdagangan. Disitukan semua terlihat apakah penjualannya, mentrolingnya, pembiayaannya atau ada kecurangan didalamnya.

Hasil wawancara dengan Asisten Pembiayaan

Makassar, 06 Februari 2019

Ibu winda

1. Bagaimana kriteria calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan Akad *mudharanah*?

Usaha yang dijalankan Minimal 2 tahun, legalitas usaha lengkap dan menurut analisa Bank itu layak.

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mendapatkan pembiayaan?

Tidak pernah catat di BI terkait pembiayaan, usahanya tidak pernah memiliki rekor buruk diseluruh Bank di Indonesia, memiliki jaminan yang layak untuk dijadikan agunan.

3. Bagaimana kebijakan BNI Syariah terkait prosedur yang harus dilewati sampai seorang nasabah berhak mendapatkan pembiayaan tersebut?

Sebelumnya pihak analis melakukan analisa terhadap kelayakan pembiayaan dan karakter calon debitur. Nasabah yang diberikan pembiayaan akad *mudharabah* adalah nasabah yang sudah ditentukan keuntungan diawal berapa yang didapatkan. Misalnya proyek. Tetapi untuk usaha lainnya seperti sulit untuk diterapkan karena melihat kondisi karakter nasabah sekarang ini. Karena pada prinsipnya akad ini mempersyaratkan kejujuran akuntabilitas.

4. Menurut BNI Syariah, persyaratan apa saja yang bisa menjadi kendala bagi calon nasabah untuk memenuhi persyaratan tersebut?

Legalitas usahanya dan tidak memperhatikan sistem administrasinya.

5. Apakah BNI Syariah mewajibkan kepada nasabah untuk membuat laporan usaha?

Harus, karena memang akad *mudharabah* ini mempersyaratkan keterbukaan (akuntabilitas) nasabah terhadap pihak perbankan.

6. Menurut BNI Syariah apa saja kendala yang dialami dalam pembiayaan akad *mudharabah* ini?

Selain administrasi, karakter dari *mudharib* belum siap untuk menerapkan akad *mudharabah*, karena namanya pengusaha maunya untung sebesar-besarnya dan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dan terkadang kekhawatiran mereka jika misalkan mereka melampirkan laporan keuangan sebenarnya yang mana posisi keuntungannya besar, biasanya mereka sedikit memanipulasi data dengan tujuan keuntungan yang mereka peroleh bisa maksimal. Jadi bagi hasil yang diserahkan kepada bank diminimalkan. Jadi kendalanya adalah Karakter Nasabah.

7. Apakah BNI Syariah melakukan pengawasan usaha nasabah?

BNI Syariah melakukan pengawasan dan sudah ada pengelolanya tersendiri

8. Jika calon nasabah tidak mampu memenuhi persyaratan jaminan, adakah solusi bagi calon nasabah tersebut tetap bisa mendapatkan pembiayaan tersebut?

Memberikan kebijakan kepada nasabah setelah pencairan. Paling lambat 1 bulan harus memenuhi persyaratan atau dengan pencairan tidak dilakukan 100%.

9. Seperti kita ketahui BNI Syariah menggunakan perhitungan bagi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah*. Bagaimanakah metode BNI Syariah dalam perhitungan bagi hasil usaha?

Setelah menerima laporan keuangan dari nasabah, terlebih dahulu menentukan apakah laporan keuangan ditentukan bagi hasilnya. Ada proses tawar menawar bagi hasil antara pihak bank dan nasabah, dan kemudian untuk menentukan berapa bagi hasil yang didapatkan juga tergantung dari resikonya.



KONSEP MUDHARABAH: PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP NET REVENUE SHARING (Study pada BNI SYARIAH)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	4%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	repositories.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	media.neliti.com Internet Source	2%
5	inspirasi.mendidik.files.wordpress.com Internet Source	2%
6	rekayasa-komputer.blogspot.com Internet Source	2%
7	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	2%
8	docplayer.info Internet Source	2%

Instructor Turnitin

SATRIANI S.I.P



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 098 Tahun 2018

TENTANG
PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah

- Membaca** Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Sulfa Nim: 90400114155 tertanggal untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Konsep Mhudarabah dalam perspektif keadilan pada Net Revenue Sharing dan profit And loss Sharing (Studi kasus pada BANK BNI Syariah Makassar)
- Menimbang**
- Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
 - Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama** Mengangkat / Menunjuk Saudara
1. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak
 2. Sumarlin, SE., M.Ak
- Kedua** Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Samata-Gowa

17 Juli 2018



Nomor : 7225 / EB.I/PP.00.9/12/2018
Lampiran : -
Hal : Undangan Seminar Proposal
A.n. Sulfa/90400114155

Samata, 09 Desember 2018

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing, untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing dan penguji pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Desember 2018
Waktu : 10.00 - 12.00 WITA
Judul Skripsi : Konsep mudharabah: perspektif keadilan pada net reenua sharing (studi kasus ada BNI Syariah Makassar)
Tempat : Ruang Seminar

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 628 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Sulfa
NIM : 90400114155
Tanggal : 20 Maret 2019
Mahasiswa Jurusan : AKUNTANSI
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Konsep mudharabah: Perspektif keadilan pada net revenue sharing (Studi pada BNI Syariah)**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji I : Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA.Ak.CA.
Penguji II : Andi Wawo, SE.,M.Sc., Ak
Pembimbing I : Dr. Lince Bulutoding SE.,M.SI . Ak
Pembimbing II : Sumarltn, SE., M.Ak.
Pelaksana : Roshani

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 21 Maret 2019
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

pNomor : **7289** /EB.I/PP.00.9/12/2018

Gowa, Desember 2018

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

Yth. UPT P2T BKPM

di Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Sulfa**
NIM : 90400114155
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Panorama Indah Blok C6

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

"Konsep Mudharabah : Perspektif Keadilan terhadap Net Revenue Sharing (Studi Kasus pada BNI Syariah makassar)"

Dengan Dosen pembimbing: **1. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.**

2. Sumarlin, SE., M.Ak

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian **di bank BNI Syariah Makassar.**

Demikian harapan kami dan Terima Kasih,

Wassalam

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

NID. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9748/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan PT. BNI Syariah Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 7239/EB.I/PP.00.9/12/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SULFA
Nomor Pokok : 90400114155
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KONSEP MUDHARABAH : PERSPEKTIF Keadilan Terhadap Net Revenue Sharing (STUDI KASUS PADA BNI SYARIAH MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 27 Desember 2018 s/d 23 Januari 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 Desember 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Bertinggal.



Makassar, 18 Februari 2019

Nomor : BNISy/MAS/340

Lamp. : -

Kepada :

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

hal : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

Surat Saudara(i) nomor : 9748/S.01/PTSP/2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Menunjuk surat Saudara tersebut di atas perihal pada pokok surat, dengan ini kami menyatakan bahwa Saudara/i **Sulfa NIM : 90400114155** Telah melakukan kunjungan ke BNI Syariah Makassar untuk melakukan penelitian dengan penelitiannya yang berjudul :

"Konsep Mudharabah : Perspektif Keadilan Terhadap Net Revenue Sharing (Studi Kasus Pada BNI Syariah Makassar)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

**PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Makassar**



**St. Sarihaibu Triana
Pgs. Operational Manager**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 545 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Sulfa, NIM : 90400114155
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Sulfa, NIM: 90400114155 untuk melaksanakan seminar hasil .
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Jamaluddin M, SE., M.SI.
Pembimbing : Dr. Lince Bulutoding SE.,M.SI . Ak
Pembimbing II : Sumarlin, SE., M.Ak.
Penguji I : Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA.Ak.CA.
Penguji II : Andi Wawo, SE.,M.Sc., Ak
Pelaksana : Roshani

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 14 Maret 2019

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIM : 195816221987031002

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Amp

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2089 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Sulfa, NIM: 90400114155
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Sulfa**, NIM: **90400114155** tertanggal 08 November 2018 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul: "**Konsep mudharabah: perspektif keadilan pada net reenua sharing (studi kasus ada BNI Syariah Makassar)**".
- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Jamaluddin M, SE., M.Si.
Pembimbing : Dr. Lince Bulutoding SE., M.Si. Ak
Pembimbing II : Sumarlín, SE., M.Ak.
Penguji I : Dr. Salful Muchlis, SE., M.SA.Ak.CA.
Penguji II : Andi Wawa, SE., M.Sc., Ak
Pelaksana : Kurniati Syukur, S.Ag.
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ditetapkan di Samata-Gowa
Pada tanggal : 03 Desember 2018
Dekan.

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sulfa, dilahirkan di Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Oktober 1996. Anak kelima (5) dari 5 (lima) bersaudara. Pasangan dari ayahanda **H. Halka** dan Ibunda **Hj. Sitti Hajar**. Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SD Inpres Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab.

Barru pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008 pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Mallusetasi, Kab. Barru dan lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Mallusetasi, jurusan IPS, dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi pada tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R